

**PERSEPSI KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI ATAS
INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Survey Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

T E S I S

OLEH:

SISKA YULIA DEFITRI
0821221023



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

**PERSEPSI KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI ATAS
INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Survey Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)**

Oleh : SISKA YULIA DEFITRI

(di bawah bimbingan Dr. Yurniwati, SE. Msi. Ak dan Suhandi, SE. M.Si Ak)

RINGKASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi dan provinsi terbagi atas kabupaten/kota, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/kota perdoman kepada undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sejak berlakunya reformasi politik maka dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau daerah otonom sekaligus sejalan dengan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana regulasi ini merupakan wujud tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel. Untuk melaksanakannya maka urusan pemerintah dibagi kepada urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antara tingkatan dan atau susunan pemerintah kepada urusan wajib dan urusan pilihan, yang pelaksanaannya berasaskan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan untuk pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah daerah menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah. Dalam PP No. 38 Tahun 2007 pasal 6 menjelaskan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi maka pemerintah dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, dengan demikian wewenang dan peran gubernur yaitu dalam rangka koordinasi untuk mengamankan dan mengawasi berbagai instruksi pemerintahan pusat seperti melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini sebagai wakil pemerintah pusat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan untuk mengetahui kesesuaian informasi yang dibutuhkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal ini yaitu SAP

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik survey, populasi penelitian di Provinsi Sumatera Barat dengan sampel adalah organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk membantu kerja gubernur dalam rangka dekonsentrasi yaitu Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Badan perencana dan pembangunan Daerah, inspektorat provinsi dan Sekretaris Daerah Provinsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 pengganti UU Nomor 22 tahun 1999, merupakan implementasi reformasi politik yang telah mengubah tata pemerintahan sebagai refleksi dari tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa urusan pemerintah yang terdiri atas urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antara tingkatan dan atau susunan pemerintah, salah satunya adalah melalui desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom atau pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah.

Undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33 Tahun 2004) merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan keinginan rakyat dengan mewujudkan keseimbangan fiskal setiap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan beriringan.

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana amanat rakyat, dalam pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan pemerintahan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi berupa pelaporan keuangan dengan cakupan yang lebih luas, jujur, terbuka dan

tepat waktu. Selain horizontal, secara vertikal pemerintah daerah juga memberikan pelaporan keuangan sebagai tanggung jawab terhadap dana perimbangan dan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Secara vertikal atau pemerintah yang lebih tinggi penting mengetahui informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah karena menurut Ekaristi (2007) dalam Wulandari dan Adi (2008) mengungkapkan, salah satu contoh perilaku asimetris terjadi karena pemerintah pusat tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kemampuan dan potensi daerahnya sendiri untuk memaksimalkan pendapatannya. Hal ini mendorong pemerintah daerah menggunakan celah kesempatan yang ada dengan tidak memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah pusat bersedia untuk memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jumlah yang besar, hal inilah yang di kemudian hari berdampak pada menurunnya kemandirian daerah.

Oleh karena itu manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintah di daerah, karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horizontal bagi aparat pemerintah di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah atasan dalam aspek pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat sebagai wakil pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah memuat jenis informasi kepatuhan terhadap aturan, kondisi keuangan, informasi perencanaan anggaran, informasi naratif, informasi kondisi ekonomi dan informasi kinerja.
2. Informasi kepatuhan terhadap aturan dan informasi kondisi keuangan yang disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat merupakan informasi yang memperoleh penilaian tertinggi sebagai informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi sedangkan informasi kinerja menjadi informasi yang memperoleh penilaian terendah atau informasi yang tidak menjadi prioritas utama, padahal informasi kinerja merupakan salah satu informasi yang memiliki fungsi penting dalam menjalankan peran dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
3. Penilaian kebutuhan Gubernur selaku kepala pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat terhadap kesesuaian informasi dengan aturan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, 1993, *Prosedur dan Strategi Penelitian Kependidikan*, Bandung, Angkasa
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Yogyakarta, BPFE
- Coryanata, Isma, 2007, *Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD)*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Makasar
- Governmental Accounting Standard Board, 1998, *Governmental Accounting and Financial Reporting Standars*, GASB, Norwalk, Conn
- Halim, Abdul. 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta
- Isyrin, 2009, *Pengaruh Independensi dan Keahlian Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating*, Universitas Andalas (Tesis), Padang
- Martiningsih, Sri Pancawati, 2009, *Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 12, Palembang
- Mardiasmo. 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Mack, Janet and Christine Ryan. 2006. *Reflections on the Theoretical Underpinnings of the General-Purpose Financial reports of Australian government Departments*, Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 19 No. 4 pp. 592-612.
- Reck. L. Jacqueline, 2001, *The Usefulness of Financial and Nonfinancial Performance Information in Resource Allocation Decision*, journal of Accounting and public policy, 20-45-71, Elsevier Science Ltd